

**DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DPLH)
KEGIATAN OPERASIONAL MENARA TELEKOMUNIKASI
KAMPUNG SUNGAI KAYU ARA KECAMATAN SUNGAI
APIT KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU TAHUN 2019**



**TOWER
BERSAMA
GROUP**



PT. TOWER BERSAMA

**The Convegence Indonesia, Lantai II Kawasan Rasuna
Epicentrum ,Jln. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan
Setaibudi Jakarta Selatan 2940**



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA SIAK - TANJUNG AGUNG - TELP/FAX.(0764) 320850
SIAK SRI INDRAPURA

REKOMENDASI
PERSETUJUAN DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DPLH)
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL TOWER TELEKOMUNIKASI
TINGGI 52 METER KAMPUNG SUNGAI KAYU ARA
KECAMATAN SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK
PT. TOWER BERSAMA

Nomor : 17 /660/DLH-S/KPTS/2019

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
 5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2118);

- Menimbang: a. bahwa terhadap permohonan Pimpinan PT. Tower Bersama Nomor : 034/TBG-TB/SUMBAGTENG/IV/2019 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Kegiatan Pembangunan dan Operasional Tower Telekomunikasi Tinggi 52 Meter Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau Tanggal 18 April 2019, berdasarkan

verifikasi administrasi terhadap permohonan tersebut dinyatakan lengkap secara administrasi;

- b. bahwa Kegiatan Pembangunan dan Operasional Tower Telekomunikasi Tinggi 52 Meter Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Provinsi Riau sudah diterbitkan Surat Keputusan Sanksi administratif paksaaan pemerintah Nomor : 30/ DLH-S/ S-ADM/ 2019 tanggal 21 Maret 2019;
- c. bahwa berdasarkan hasil rapat pemeriksaan substansi teknis DPLH Kegiatan Pembangunan dan Operasional Tower Telekomunikasi Tinggi 52 Meter Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau pada tanggal 23 April 2019 dianggap telah memenuhi persyaratan teknis DPLH;

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, memberikan Rekomendasi Persetujuan Dokumen kepada :

- a. Nama Perusahaan : PT. Tower Bersama
- b. Bidang Usaha : Konstruksi Sentral Telekomunikasi
- c. Penanggungjawab : Yoandi Saputra
Kegiatan
- d. Alamat Kantor : Jl. Pulau Bidadari 1/33 RT 005 RW 009
Kelurahan Kembangan Utara Kec. Kembangan
Jakarta Barat
- e. Lokasi Kegiatan : Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan
Sungai Apit, Kabupaten Siak
- f. Jenis Dokumen : Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)
- g. Judul Dokumen : Kegiatan Pembangunan dan Operasional Tower
Telekomunikasi Tinggi 52 Meter Kampung Sungai
Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak
Provinsi Riau

Untuk diterbitkannya Izin Lingkungan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak, dengan ketentuan yang harus dipenuhi sebagai berikut

1. PT. Tower Bersama dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan dan wajib memiliki :
 - a. Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk tahapan konstruksi dan operasi yang terdiri atas :
 - Kebutuhan lain sesuai dengan kebutuhan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - b. Izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya;
2. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban pengelolaan dampak lingkungan sebagaimana tercantum pada matrik Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang terdapat dalam lampiran rekomendasi ini.
3. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan kewajiban, juga melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan;

- b. Mengupayakan aplikasi 3R (*Reduce*, *Reuse* dan *Recycle*) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
 - c. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun akan diserahkan kepada pihak ketiga yang memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Menerapkan SOP (*Standard Operating Procedure*) pengelolaan limbah;
 - e. Melakukan sosialisasi kegiatan kepada ~~Pemerintah Daerah~~, tokoh masyarakat setempat tentang pelaksanaan kegiatan;
 - f. Memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut;
 - h. Melanjutkan kegiatan pemberdayaan masyarakat (*Community Development/CD*) berdasarkan kerangka kepedulian sosial (*Corporate Social Responsibility/CSR*) terhadap masyarakat sekitarnya;
 - i. Melaksanakan kegiatan pada lokasi yang telah diizinkan;
 - j. Menyiapkan biaya penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup serta melaksanakan pemulihan fungsi lingkungan hidup;
 - k. Memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 - l. Menyampaikan hasil pelaksanaan ketentuan dalam Rekomendasi DPLH secepatnya setelah selesainya pelaksanaan kegiatan, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini, kepada : Bupati Siak u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak.
4. Rekomendasi DPLH ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan ini.
 5. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan.
 6. Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam DPLH, yang terkait dengan komponen fisik, kimia, dan biologi, setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan ini ditetapkan, kepada: Bupati Siak u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak.
 7. Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana tercantum pada Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), wajib melaporkan kepada instansi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak paling lama 1 x 24 jam;
 8. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

9. Rekomendasi DPLH ini dapat dibatalkan apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum Pasal 37 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
10. ~~Rekomendasi Dokumen~~ Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah disetujui, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Izin Lingkungan dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. PT. Tower Bersama sebagai penanggung jawab Kegiatan Pembangunan dan Operasional Tower Telekomunikasi Tinggi 52 Meter Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan tersebut.

Demikian rekomendasi persetujuan dokumen ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal : 10 Mei 2019

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK,
KABUPATEN SIAK, DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Drs. H. SYAFRILENTI, M.Si
PEMBAH UTAMA MUDA
NIP.19640803 199403 1 003

Tembusan disampaikan kepada YTH:

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura;
2. Arsip.